

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah masalah yang dilihat oleh semua negara di bumi ini, keadaan yang sedang dialami, kejadian ini tidak dilihat dari kurangnya kualitas terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Permasalahan masih menjadi pembicaraan yang harus diperhatikan. Dalam perekonomian dapat terlihat dari berbagai sudut dan tergantung pada cara pandang yang digunakan, garis kemiskinan juga telah bergeser. Angka kemiskinan di wilayah Aceh masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan berbagai wilayah di pulau Sumatera (Agustina, 2018).

Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Pemasalahan kemiskinan ialah permasalahan yang lengkap dan bersifat multidimensional, dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Adit Agus Prastyo, 2010). Kemiskinan multidimensional artinya kebutuhan manusia itu bermacam-macam maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi (Prima Sukmaraga, 2011).

Kemiskinan merupakan kondisi dimana ketidak mampuan ekonomi untuk menjadi standar hidup rata-rata masyarakat di sebuah daerah, kondisi ketidakmampuan ini dilihat dari rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, maupun rumah layak huni. Keadaan

lain adalah ketidak mampuan dari sisi ekonomi, materi, maupun fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar, makanan dan bukan makan yang di ukur dengan pengeluaran (BPS, 2016).

Secara absolut, tingkat kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi. Dari jumlah tersebut, 61,32 persen di antaranya masyarakat yang hidup di desa dan umumnya bekerja di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang dominan di perdesaan. Faktor pertama yang memberikan pengaruh pada persentase kemiskinan adalah jumlah penduduk yang besar. Jika dilihat dengan kualitas yang memadai merupakan modal pembangunan yang handal, namun jika kualitasnya rendah akan menjadi beban pembangunan. Mereka yang tidak memiliki tanah atau perlengkapan produksi biasanya menjadi korban pertama dari tindakan penghematan anggaran pemerintah (Rachmawati, 2020).

Laporan kemiskinan di Indonesia dalam satu tahun dua kali berdasarkan data bps yang dirilis pada 17 januari 2022, persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 sebesar 9,71% , angka tersebut turun 0,43 % dari periode maret 2021 dan 0,48 persen dari periode September 2020. Di ketahui jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 mencapai 26,50 juta orang. Khususnya Aceh yang menduduki peringkat kelima dengan jumlah penduduk miskin terbanyak setelah Maluku dengan angka 16,30 persen dan Aceh yaitu 15,41 persen .

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS provinsi Aceh memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi terutama di 10 kabupaten seperti Kabupaten Aceh

Singkil, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Utara. Berikut ini adalah tabel persentase penduduk miskin di 10 Kabupaten di Aceh.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin Di 10 Kabupaten Di Aceh

Kabupaten	Tahun		
	2018	2019	2020
Aceh singkil	21,25	20,78	20,20
Gayo lues	20,70	19,87	19,32
Pidie	20,47	19,46	19,23
Pidie jaya	20,17	19,31	19,19
Bener meriah	20,13	19,30	18,89
Simeulue	19,78	18,99	18,49
Aceh barat	19,31	18,79	18,34
Nagan raya	18,97	17,97	17,70
Subulussalam	18,51	17,95	17,60
Aceh utara	18,27	17,39	17,02

Sumber: BPS Aceh (2020)

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin tertinggi pada 10 Kabupaten di Aceh tahun 2018 berkisar pada 18,27 sampai 21,25 persen. Faktor kemelaratan di 10 Kabupaten tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang kurang serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemudian jumlah penduduk terus bertambah secara konsisten. begitu juga kualitas jumlah penduduk di 10 kabupaten tersebut yang umumnya kurang bermanfaat dalam memanfaatkan potensi yang ada. Hal ini dikarenakan oleh sifat SDM yang semakin menurun sehingga sulit untuk lepas dari kemelaratan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan

antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk yang telah berusia 15-64 tahun yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Semakin banyak masyarakat yang produktif maka akan menghasilkan *output* yang tinggi pula yang mempengaruhi tingkat pendapatan perkapita sehingga akan berdampak terhadap persentase penduduk miskin. Untuk mengetahui lebih jelasnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di 10 Kabupaten Provinsi Aceh dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Di 10 Kabupaten Di Aceh

Kabupaten	Tahun		
	2018	2019	2020
Aceh singkil	63,11	59,25	61,97
Gayo lues	78,28	75,23	86,36
Pidie	62,04	63,37	65,55
Pidie jaya	61,37	60,46	62,13
Bener meriah	78,66	77,16	82,52
Simeulue	64,66	62,68	70,37
Aceh barat	54,58	61,18	59,41
Nagan raya	60,83	61,63	66,61
Subulussalam	58,76	64,25	64,18
Aceh utara	63,56	61,39	60,31

Sumber: BPS Aceh (2020)

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa penduduk miskin dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selanjutnya sumber yang menyebabkan pengaruh jumlah penduduk miskin yang kedua Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu salah satu tolak ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kemiskinan di wilayah tersebut. Dengan demikian diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan

pula bahwa jika nilai IPM tinggi maka seharusnya tingkat kemiskinan rendah. Berikut persentase tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 10 Kabupaten di Provinsi Aceh.

Tabel 1.3
Persentase Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Di 10 Kabupaten Di
Aceh

Kabupaten	Tahun		
	2018	2019	2020
Aceh singkil	68,02	68,91	68,94
Gayo lues	68,88	66,87	67,22
Pidie	69,93	70,41	70,63
Pidie jaya	72,12	72,87	73,20
Bener meriah	72,14	72,97	72,98
Simeulue	64,74	65,70	66,03
Aceh barat	70,47	71,22	71,38
Nagan raya	68,15	69,11	69,18
Subulussalam	63,48	64,46	64,93
Aceh utara	68,36	69,22	69,33

Sumber: BPS Aceh (2020)

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa tingkat persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat dari tahun ke tahun selanjutnya, walaupun tingkat penduduk miskin juga menurun namun pada data yang diupdate oleh BPS 10 Kabupaten di Provinsi Aceh ini masih menjadi peringkat tertinggi. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus di 10 Kabupaten Kota di Aceh dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Tahun 2020)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Berapa besar pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan di 10 kabupaten di provinsi Aceh ?
2. Berapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di 10 Kabupaten di Provinsi Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang dapat dilihat dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan di 10 Kabupaten kota di Provinsi Aceh.
2. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Aceh di 10 Kabupaten kota di Provinsi Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat dari hasil penelitian ini, diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

1. Dapat menambah ilmu serta pengetahuan khususnya tentang pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan di 10 kabupaten kota di provinsi Aceh.
2. Dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan di 10 kabupaten kota di Provinsi Aceh.

3. Dapat menambah informasi pemikiran dan bahan kajian dalam penelitian selanjutnya

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai referensi bagi masyarakat Aceh khusus di 10 kabupaten kota termiskindi Provinsi Aceh tahun 2020.
2. Sebagai masukan bagi pemerintah Aceh guna dalam pengentasan kemiskinan di 10 kabupaten kota di Provinsi Aceh.
3. Sebagai sarana belajar dan masukan bagi penulis dalam menerapkannyaterhadap kasus nyata dan relevan.